

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini akan membahas mengenai kepentingan ekonomi dan kepentingan pengaruh Rusia dalam konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan. Rusia berupaya mempertahankan hubungannya dengan Armenia dan Azerbaijan sebagai penengah konflik. Konflik antara Armenia dan Azerbaijan dalam memperebutkan wilayah sengketa Nagorno-Karabakh telah terjadi sejak berabad-abad ke belakang. Konflik ini merupakan konflik etnis, yang mana Armenia mengklaim bahwa wilayah Karabakh adalah miliknya sejak abad ke-4 SM. Namun, terjadi perdebatan karena terdapat ketidaksesuaian, yang mana lokasi yang dimaksud Armenia pada sejarahnya ditinggali oleh keturunan penduduk Azerbaijan, menjadikan wilayah tersebut pada masa kini dapat sebagai milik Azerbaijan. Armenia tidak setuju dengan keputusan ini (Cornell, 1999). Pada tahun 1988, perang bersenjata antara Armenia dan Azerbaijan pertama kali terjadi. Aksi demonstrasi politik penduduk Armenia yang tinggal di Karabakh meminta Karabakh dikembalikan pada Armenia (Waal, 2003). Uni Soviet menolak keputusan menyerahkan wilayah Nagorno-Karabakh kepada Armenia. Tahun 1991, Armenia menggunakan persenjataan Soviet yang jatuh ke tangannya untuk menguasai beberapa wilayah Azerbaijan. Perpecahan peperangan ini menyebabkan kurang lebih 30.000 korban (Center for Preventive Action, 2022). Pasca bubarnya Uni Soviet, peperangan semakin tidak terkendali dan Armenia masih terus berusaha menguasai beberapa wilayah Azerbaijan (Askerov, 2020). Usaha tersebut berhasil ketika tahun 1993, Armenia menguasai Nagorno-Karabakh beserta 20% wilayah Azerbaijan (Coyle, Russia's Border Wars and Frozen Conflicts, 2018).



Gambar 1: Peta Wilayah Azerbaijan yang dikuasai Armenia tahun 1993 (sumber: www.istockphoto.com)

Hubungan Rusia dengan Armenia berakar sejak zaman Kekaisaran Ottoman, dimana pada saat itu Rusia menyelamatkan mereka dari penindasan Ottoman Turki (Lewy, 2005). Pada era modern, hubungan Rusia dan Armenia bermula tahun 1992 dengan penandatanganan sebanyak 250 perjanjian sebagai mitra. Kemitraan keduanya ditandai dengan bergabungnya Armenia dalam organisasi geopolitik *Commonwealth Independent States* (CIS) yang merupakan organisasi kerjasama dalam berbagai bidang, yang mana sebagian anggotanya merupakan negara bekas Uni Soviet. Keduanya juga beraliansi militer dalam *Collective Security Treaty Organization* (CSTO) sehingga beberapa pasukan Rusia ditempatkan di Armenia, atas permintaan Armenia sendiri. Selain aliansi militer, kemitraan keduanya seputar ekonomi dimana Armenia memasok material bagi PLTN Metsamor (İBRAHİMOV, 2021) begitu pula dengan migas dari Rusia. Sehingga menjadikan Rusia sebagai pemasok utama (International Energy Agency, 2022). Berkat kedekatan ini, Rusia juga menjadi tujuan bekerja migran dari Armenia (Balsyte, 2017). Namun, hubungan Rusia-Armenia sempat terancam setelah rencana jalur ekspor pipa Iran-Armenia digunakan. Rusia segera mengamankan permasalahan tersebut demi kepentingannya dan demi mempertahankan pengaruhnya di kawasan.

Kemitraan Rusia dan Azerbaijan bermula tahun 1992. Hubungan keduanya baru membaik pada tahun 1993 ketika masa kepemimpinan Presiden Heydar Aliyev, yang mana akhirnya Azerbaijan bersedia menjadi anggota CIS (Aslanli,

2009). Keduanya memiliki kerjasama berupa mengajak perusahaan minyak Rusia, LUKoil, bekerjasama. Kerjasama ini menyepakati 10% saham *State Oil Company of Azerbaijan Republic* (SOCAR) diberikan pada LUKoil. Keekerabatan kemudian terjadi antara pimpinan perusahaan LUKoil yang merupakan etnis Azeri dengan Presiden Heydar Aliyev dan Ilham Aliyev, wakil pimpinan SOCAR, yang menjadi faktor pembentukan perusahaan asuransi bersama, Ateshgah (Ismailzade, 2006). Azerbaijan dapat menghasilkan dan memproduksi minyaknya sendiri. Guna mempermudah pergerakan ekspor minyaknya menuju negara-negara di Eropa, Azerbaijan memiliki jalur ekspor pipa Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC). Bersama beberapa negara anggota CIS lainnya, Azerbaijan juga tergabung dalam institusi multilateral kerjasama budaya *Intergovernmental Foundation for Educational, Scientific and Cultural Cooperation* (IFESCO). Meskipun begitu, ada beberapa alasan Azerbaijan curiga kepada Rusia yaitu karena Rusia membantu strategi dan militer ketika Armenia menguasai beberapa wilayah Azerbaijan dan Rusia yang pernah terlibat politik domestik Azerbaijan. Selama kepemimpinan Heydar Aliyev, Azerbaijan mengimbangkan kebijakan luar negerinya antara Barat dan Rusia. Sedangkan, Rusia berharap hanya pengaruhnya yang kuat daripada lainnya kepada negara tersebut, termasuk dalam ekonominya.

Rusia akhirnya memutuskan terlibat sebagai penengah untuk konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan, dikarenakan kebijakan luar negeri Rusia dilakukan dengan dasar untuk mempertahankan hubungan termasuk kepentingan ekonomi dan pengaruh terhadap negara-negara di sekitarnya, termasuk kepada Armenia dan Azerbaijan serta pengaruh untuk menjadi *great power* di Kaukasus Selatan. Rusia tergabung dalam OSCE Minsk Group yang mencari resolusi Nagorno-Karabakh, memfasilitasi pertemuan kedua negara, hingga membuat kedua negara menandatangani Kesepakatan Gencatan Senjata tahun 1994, yang berhasil menghentikan perang bersenjata antara Armenia dan Azerbaijan. Namun, konflik perebutan wilayah masih berlanjut (Khan, 2021). Berbagai pelanggaran yang dilakukan pasca penandatanganan Kesepakatan Gencatan Senjata 1994, menjadi faktor pembahasan proposal perdamaian oleh OSCE Minsk Group pada OSCE Summit di Lisbon.

Proposal-proposal tersebut menjelaskan menentukan status legal wilayah Nagorno-Karabakh berdasarkan *self-determination*—menjadikan Nagorno-Karabakh tingkat pemerintahan tertinggi di Azerbaijan, perlindungan penduduknya, dan kepatuhan seluruh pihak pada ketentuan penyelesaian. Ada pula yang menawarkan penggabungan seluruh masalah, proposal yang langsung tidak diterima, dan pengajuan wilayah tersebut dianggap menjadi *common state* ditolak. Proposal tersebut membuat Rusia juga menolak menganggap Nagorno-Karabakh sebagai negara bersama. Kesepakatan “*land-swap*” diajukan yaitu wilayah Nagorno-Karabakh dicaplok Armenia dan wilayah Meghri dicaplok Azerbaijan. Kedua negara jelas menolak.

Memasuki abad ke-21, Rusia sebagai mediator aktif memfasilitasi pertemuan presiden Armenia dan presiden Azerbaijan bersama. Beberapa bentrokan yang terjadi di perbatasan wilayah Nagorno-Karabakh sebagai bentuk pelanggaran gencatan senjata menjadi pemicunya. Seperti pada tahun 2008, Rusia bersama presiden Armenia dan presiden Azerbaijan bertemu untuk kembali menegaskan komitmen mereka dalam resolusi konflik. Sebagai penengah, Rusia menunjukkan simpatinya kepada kedua negara, dengan mengunjungi Armenia dalam upayanya mendamaikan konflik berupa bentrokan, serta menyatakan untuk mencapai perdamaian akan terus bekerjasama dengan Armenia dan Azerbaijan. Tahun 2011, Rusia memfasilitasi pertemuan kembali untuk mengembalikan kepercayaan antara Rusia, Armenia, dan Azerbaijan dan melakukan gencatan senjata. Akan tetapi, pada masa kepemimpinan Dmitry Medvedev, beliau menyatakan, “Hanya ada satu cara untuk resolusi konflik Nagorno-Karabakh: dengan cara membuat pengaturan. Pengaturan-pengaturan tidak ada alternatif. Konflik bisa diselesaikan dengan pengaturan, karena pengaturan tidak ada alternatif. Oleh karena itu, konflik harus diselesaikan dengan membuat pengaturan. Sebagai presiden, saya telah menghabiskan banyak waktu untuk masalah ini. Berkat usaha saya, selama beberapa tahun terakhir delapan pertemuan trilateral telah diselenggarakan. Menurut pendapat saya, ini adalah hasil yang baik karena kami mendekatkan pandangan—agar tidak terlalu bersebrangan—dengan satu sama lain.” Pernyataan tentang menyamakan pandangan untuk menyelesaikan konflik mengundang

pertentangan, dibandingkan pernyataan ketika Vladimir Putin memimpin pada tahun 2014, dimana Putin menyatakan, “Rusia tertarik dalam menurunkan ketegangan antara Armenia dan Azerbaijan. Armenia berusaha mencari jalan keluar dari konflik ini untuk demi pengembangan ekonominya. Tujuan Azerbaijan sama. Meskipun demikian, sangat diperlukan pendekatan yang pantas supaya tidak ada pihak merasa menang atau kalah dari lainnya.” (Galstyan, 2017).

Tahun 2014, Vladimir Putin yang menduduki kursi presiden kembali, melakukan pertemuan bilateral dengan Armenia dan Azerbaijan. Peningkatan persetujuan mendorong Putin mencari solusi yang disetujui kedua pihak. Namun, pelanggaran gencatan senjata menghasilkan perang menggunakan senjata berat antara Armenia dan Azerbaijan. Usaha Rusia adalah mempertemukan presiden dan wakil presiden kedua negara untuk menghentikan perang dan melakukan gencatan senjata di Moskow (Galstyan, 2017).

Empat tahun berikutnya, Azerbaijan memulai peperangan untuk menarik perhatian internasional dalam resolusi konflik. Azerbaijan menguasai beberapa wilayah penting Armenia yang bersebalahan dengan Nagorno-Karabakh. Perang ini menewaskan total 6000 korban. Menanggapi hal tersebut, Rusia kembali mendorong Armenia dan Azerbaijan untuk ikut serta dalam negosiasi perdamaian. Pada 9 November 2020, ketiga negara kemudian menandatangani perjanjian perdamaian yang secara garis besar membahas tentang gencatan senjata, pengembalian tujuh distrik di Nagorno-Karabakh ke Azerbaijan, dan pengerahan pasukan perdamaian Rusia di Lachin Corridor yang berlaku selama lima tahun ke depan, sampai tahun 2025 (Welt & Bowen, 2021).

Perbedaan pandangan politik Medvedev dan Putin dalam konteks sebagai penengah konflik Nagorno-Karabakh saat menjabat sebagai presiden Rusia, menunjukkan bahwa keduanya memiliki arah kebijakan luar negeri yang berbeda pada isu tersebut. Pada masa pemerintahan Putin, Putin memiliki pandangan politik yang netral terhadap Armenia dan Azerbaijan (Galstyan, 2017). Oleh karena itu, upaya mediasi yang dilakukan oleh Rusia hanya difokuskan pada tujuan mempertahankan *status quo* di Nagorno-Karabakh.

Dengan mempertahankan *status quo*, Rusia dapat memaksakan pengaruh politiknya secara tradisional terhadap Armenia dan Azerbaijan. Segala bentuk upaya perubahan terhadap *status quo* di wilayah bekas Uni Soviet akan mengganggu kredibilitas dan reputasi Rusia di kawasan (Minzarari, 2020). Sebaliknya, perdamaian antara Armenia dan Azerbaijan akan mengurangi dependensi Armenia terhadap Rusia, yang kemudian memberinya kesempatan untuk mempererat hubungan dengan Barat (de Waal, 2024).

Di sisi lain, pada masa pemerintahan Medvedev, Rusia dinilai sangat aktif dalam upaya mediasi pada konflik Nagorno-Karabakh. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi regional yang sedang tidak stabil karena konflik antara Rusia dan Georgia pada tahun 2008 (Galstyan, 2017). Oleh karena itu, Medvedev pun aktif dalam upaya resolusi konflik antara Armenia dan Azerbaijan untuk menghindari eskalasi konflik bersenjata di antara kedua negara di Nagorno-Karabakh. Di samping itu, Medvedev juga ingin menunjukkan bahwa resolusi perdamaian dapat tercapai di Nagorno-Karabakh dengan peran aktif dari Rusia (Galstyan, 2017).

Akan tetapi, berbeda dengan Putin, Medvedev dinilai memiliki kecenderungan terhadap Azerbaijan. Hal tersebut dipengaruhi oleh hubungan kerja sama antara Rusia dan Azerbaijan di sektor minyak dan gas. Azerbaijan, sebagai salah satu negara produsen minyak dan gas alami terbesar di dunia, berkontribusi dalam kepentingan Rusia untuk memonopoli jalur pasokan minyak ke Eropa (Sindelar, 2010). Di samping itu, bagi Rusia, Azerbaijan tidak menunjukkan keinginan untuk berintegrasi dengan Barat, berbeda dengan Armenia yang secara aktif menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Uni Eropa. Kondisi tersebut membuat Azerbaijan menjadi mitra yang lebih menguntungkan bagi kepentingan Rusia di masa pemerintahan Medvedev (Sindelar, 2010). Walaupun demikian, seluruh kebijakan pemimpin Rusia pada isu Nagorno-Karabakh dapat dilihat sebagai upaya Rusia untuk menciptakan citra positif, baik dalam lingkup regional ataupun internasional (Galstyan, 2017).

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Rusia memilih menjadi penengah dan bersikap netral dalam konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan?

C. Kerangka Teori

1. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Kerangka teori merupakan identifikasi teori-teori yang digunakan sebagai landasan berpikir untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan konsep kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri (*foreign policy*) merupakan keputusan dan tindakan, yang melibatkan hubungan antara satu negara tertentu sampai batas tertentu. Kebijakan luar negeri dapat dilihat sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dengan tujuan untuk mempertahankan atau mengubah aspek tertentu di lingkungan internasional yang berkaitan dengan aktivitas negara tersebut. Holsti (1983) menyebutkan bahwa kebijakan luar negeri diimplementasikan dengan perhitungan yang matang berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, baik untuk menyelesaikan permasalahan tertentu ataupun melakukan perubahan terhadap aspek dalam hubungan internasional suatu negara. Lebih lanjut, Rosenau (1974) menjabarkan bahwa kebijakan luar negeri dilakukan dengan berorientasi pada tujuan, bukan hanya merupakan kebijakan yang dilakukan secara sembarang.

Holsti (1983) selanjutnya menjabarkan empat aspek yang mendasari kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu orientasi, peran negara, tujuan, dan aksi.

1. Orientasi

Orientasi merujuk pada sikap dan sudut pandang suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya. Orientasi selanjutnya mendasari pembentukan strategi dasar untuk mencapai tujuan domestik dan internasional dengan melihat faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi

negara tersebut. Faktor eksternal tersebut kemudian dilihat berdasarkan nilai, kepentingan, dan tujuan dari negara sebelum akhirnya diolah menjadi kebijakan luar negeri. Dengan kata lain, orientasi merupakan cara pandang negara terhadap ancaman eksternal yang selanjutnya diwujudkan dalam strategi ataupun kebijakan luar negeri (Holsti, 1983).

Dalam konteks keterlibatan Rusia dalam resolusi konflik Nagorno-Karabakh, terdapat dua hal yang menjadi dasar dalam orientasi Rusia terhadap konflik tersebut. Pertama, kebijakan luar negeri Rusia dipengaruhi oleh persepsi ancaman dan kekhawatiran terhadap serangan dari negara lain, sehingga Rusia memanfaatkan wilayah-wilayah di sekitarnya sebagai *buffer* (Kotkin, 2016). Kedua, kebijakan luar negeri Rusia dilakukan dengan dasar untuk mempertahankan hubungan dan pengaruh terhadap negara-negara di sekitarnya, khususnya negara bekas Soviet. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan identitas imperial Rusia (Laurelle, 2015).

2. Peran Negara

Peran negara merujuk pada pandangan pembuat keputusan terhadap bagaimana sikap yang tepat untuk dilakukan oleh negara dalam situasi tertentu. Hal ini berkaitan dengan orientasi, yang mana orientasi berkaitan dengan sudut pandang negara, sedangkan peran negara berkaitan dengan sikap yang sepatutnya diambil oleh negara berdasarkan sudut pandang tersebut (Holsti, 1983).

Dalam konteks penelitian ini, Rusia memandang dirinya sebagai *great power* yang merupakan salah satu dari kekuatan besar di dunia. Status *great power* tersebut membuat Rusia merasa berhak untuk mendapatkan hak spesial dalam hubungan internasional, misalnya dengan mendapatkan peran khusus dalam upaya resolusi konflik negara lain, akses kerja sama yang mudah dengan *great power* lain, dan kedaulatan yang lebih besar

sehingga aktor eksternal tidak dapat mencampuri urusan domestik Rusia. Rusia ingin dianggap memiliki pengaruh yang setara dengan *great power* lainnya sehingga ia enggan dikuasai oleh negara ataupun organisasi lain (Radin & Reach, 2017).

3. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh negara dengan cara menyebarkan pengaruhnya di lingkungan eksternal ataupun mempengaruhi sikap dari negara lain (Holsti, 1983). Tujuan berkaitan dengan kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh negara melalui kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, tujuan Rusia dalam konflik Nagorno-Karabakh dapat dilihat melalui empat aspek kepentingan. Pertama adalah kepentingan ideologi, yakni kepentingan Rusia untuk mempertahankan seperangkat nilai yang dimiliki ataupun dipercaya. Kepentingan tersebut juga berkaitan dengan penyebaran nilai dan sudut pandang yang dimiliki oleh Rusia ke luar negeri. Sebagai contoh, Rusia berupaya untuk menyebarkan pandangan bahwa Rusia merupakan negara *great power* yang kuat dan mampu mengatasi permasalahan di lingkup regional, seperti konflik Nagorno-Karabakh. Rusia ingin menunjukkan bahwa konflik-konflik tersebut dapat terselesaikan selama ada campur tangan dari Rusia yang menganggap dirinya sebagai negara hegemon di kawasan tersebut.

Kedua adalah kepentingan ekonomi, yang mana Rusia berupaya untuk mempertahankan kerja sama perdagangan antara negara-negara yang terlibat dalam konflik ataupun mempertahankan aktivitas ekonomi yang dipengaruhi oleh konflik Nagorno-Karabakh. Dalam hal ini, Rusia memiliki kepentingan untuk mempertahankan perdagangan energi ke Armenia dan Azerbaijan. Selain itu, Rusia membutuhkan Azerbaijan

untuk menjembatani perdagangan energinya ke Eropa dengan cara ekspor kembali dari Azerbaijan.

Ketiga adalah kepentingan pertahanan, dimana Rusia melihat adanya ancaman eksternal terhadap lingkungan domestiknya jika tercapai situasi tertentu dalam konflik Nagorno-Karabakh. Beralihnya Armenia ke Barat akan memberikan ancaman keamanan bagi Rusia yang memandang Armenia sebagai *buffer*. Selain itu, kepemimpinan Nikol Pashinyan di Armenia, yang dinilai merupakan pro-Amerika, juga berpengaruh negatif terhadap pemerintahan Rusia. Di sisi lain, tidak adanya presensi militer Rusia di Azerbaijan juga dikhawatirkan akan meningkatkan pengaruh dari negara lain di Azerbaijan, yang dinilai mengancam keamanan militer Rusia.

Keempat adalah kepentingan tatanan internasional, dimana Rusia berupaya untuk menjaga *status quo* regional untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimilikinya, mulai dari mempertahankan aktivitas ekonomi hingga menghindarkan Rusia dari ancaman eksternal. Keempat kepentingan tersebut mendasari perumusan kebijakan luar negeri Rusia yang kemudian diterjemahkan dalam aksi nyata untuk mengimplementasikan kebijakan luar negerinya.

4. Aksi

Aksi secara garis besar menjelaskan tindakan yang diimplementasikan secara nyata oleh negara dengan mempertimbangkan orientasi, peran negara, dan tujuan. Dengan kata lain, aksi digunakan untuk mencapai ataupun melindungi tujuan tertentu (Holsti, 1983). Dalam penelitian ini, aksi yang dibentuk oleh orientasi, peran negara, dan tujuan yang dimiliki oleh Rusia diwujudkan melalui keterlibatannya dalam resolusi konflik Nagorno-Karabakh. Rusia selanjutnya bersikap netral dengan tidak

menunjukkan keberpihakan yang terlalu jelas, baik terhadap Armenia ataupun Azerbaijan.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Dalam penelitian ini penulis juga akan menggunakan konsep kepentingan nasional. Kepentingan nasional (*national interest*) menjelaskan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sesuai hal yang dicita-citakan suatu negara. Menurut Daniel S. Papp (1988), kepentingan nasional berkaitan dengan *power* yang mencakup aspek seperti ekonomi, ideologi, keamanan, moralitas, dan legalitas.

Secara mendetail, kepentingan nasional terdapat empat pembagian mendasar menurut Nuechterlein (1976) yaitu;

1. Kepentingan pertahanan merupakan perlindungan terhadap negara ataupun warga negara dari segala bentuk ancaman yang berasal dari luar negara.
2. Kepentingan ekonomi merupakan kepentingan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara yang nantinya digunakan ketika interaksi dengan negara lain.
3. Kepentingan tatanan internasional merupakan kepentingan penjagaan politik internasional dan sistem ekonomi supaya warga negara dalam melaksanakan kegiatan perdagangan di luar negaranya merasa aman.
4. Kepentingan ideologi merupakan kepentingan perlindungan tentang pandangan hidup yang diyakini suatu warga negara.

Kepentingan nasional menjadi konsep penting bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Sebuah negara kemudian akan menggunakannya ketika berhubungan dengan negara lain. Untuk memudahkan mencapai suatu kepentingan, pengaruh suatu negara berperan besar. Dikutip dari artikel jurnal, seperti yang dikatakan Morgenthau dalam '*Another "Great Debate": The National Interest of the United States*', yang mana tertulis bahwa

negara melindungi tiga hal utama dalam kepentingan nasionalnya yaitu wilayah, budaya, dan institusi politik (Dermawan, 2019). Kepentingan nasional berguna untuk mempertahankan pengaruh kuat eksistensi suatu bangsa dan membentuk kebutuhan krusial untuk menyejahterakan warga negaranya.

Rusia merupakan negara besar pecahan Uni Soviet dengan wilayah paling besar membentang di Eurasia tetap perlu menjalin hubungan dengan negara berdaulat lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan negaranya—yang merupakan kepentingan nasionalnya. Dengan konsep kepentingan nasional, untuk memahami kepentingan ekonomi dan pengaruh Rusia kepada Armenia dan Azerbaijan.

Ketika konflik Nagorno-Karabakh terjadi, Rusia sebagai negara memiliki pengaruh besar turun tangan untuk menjadi mediator secara individu maupun dalam OSCE Minsk Group. Untuk menjaga perdamaian dunia, Rusia berlaku sebagai mediator dengan cara memfasilitasi pertemuan untuk mencapai kesepakatan bersama.

Rusia terkenal sebagai produsen migas terbesar. Dari migasnya, Rusia memperjualkannya ke negara-negara di sekitarnya dan juga negara-negara Eropa untuk mencapai kepentingan ekonominya. Sudah tidak bisa dipungkiri bahwa Rusia menjadi pemasok energi utama. Dalam hal ini, Armenia dan Azerbaijan menjadi salah duanya; terutama Armenia yang bergantung kepada Rusia.

Rusia menjadi mediator dan bersikap netral untuk mencapai kepentingan ekonominya kepada kedua negara yang sama-sama menguntungkan dari penjualan migas dan jalur perdagangan. Azerbaijan yang dapat memproduksi minyaknya sendiri namun masih menggantungkan impor dari Rusia, berupa minyak dan impor gas dari Rusia untuk dikonsumsinya (Parkhomchik, 2015). Namun, jalur pipa yang dibangun Azerbaijan atas kesepakatan dengan Turki menjadi tantangan bagi Rusia (Ismailzade, 2006).

Tidak ingin kehilangan pula eksistensi dan pengaruhnya, Rusia menggunakan pengajaran bahasa, budaya, dan memanfaatkan keberadaan diaspora Armenia dan

Azerbaijan di negaranya. Rusia membangkitkan budayanya kembali karena dahulu pernah memiliki keterkaitan budaya, memberi mereka izin migrasi ke negaranya, dan menjamin keselamatannya. Rusia juga menjaga hubungan dengan etnis-etnis minoritas dalam kaitannya mempertahankan pengaruhnya terhadap kedua negara.

D. Hipotesis

Rusia memilih menjadi penengah dan bersikap netral dalam konflik Nagorno-Karabakh adalah untuk:

1. Mempertahankan Armenia dan Azerbaijan sebagai mitra ekonomi penting bagi Rusia di wilayah Kaukasus Selatan
2. Mempertahankan pengaruh Rusia kepada Armenia dan Azerbaijan

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

1. Alasan Rusia sebagai mediator memilih bersikap netral dalam konflik Nagorno-Karabakh
2. Mengetahui kepentingan ekonomi dan pengaruh Rusia dalam hubungannya dengan Armenia dan Azerbaijan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif menekankan kepada proses penelitian deskripsi suatu fenomena. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu data sekunder. Proses pengolahan data sekunder dari berbagai tulisan, mulai dari buku, jurnal, artikel, laporan pemerintah, situs web yang kredibel, dan sumber terpercaya lainnya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I membahas mengenai konflik Nagorno-Karabakh, hubungan Rusia dengan Armenia dan Azerbaijan, dan peran Rusia sebagai penengah dalam konflik tersebut. Kemudian, rumusan masalah sebagai fokus batasan penelitian. Penulis menggunakan kerangka teori untuk menganalisis masalah secara ilmiah.

BAB II menjelaskan mengenai awal mula konflik Nagorno-Karabakh dan bagaimana Rusia terlibat menjadi mediator

BAB III membahas kepentingan ekonomi dan kepentingan pengaruh Rusia dengan Armenia dan Azerbaijan

BAB IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari penjelasan pada bab sebelumnya dan merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian ini